DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

----------. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

Hadjon, Philipus M dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan 10. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Koentjara, Diana Halim dan Johanes Sardadi. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi kedua. (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Jakarta, 2012).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*. (Jakarta: Komnas HAM Press, 2008).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 1997).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 2. (Jakarta: UI Press, 1982).

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

ARTIKEL/BERITA MEDIA MASSA:

‘”Dosen dan Pegawai Dikontrak: Selesaikan Berbagai Persoalan Penegerian Perguruan Tinggi Swasta”, *Kompas*, Kamis, 7 Januari 2016.

“Menristekdikti Jangan Lalai Naikkan Status PTS”, *Rakyat Merdeka*, Jum’at, 8 Januari 2016.

"Status Diharapkan Segera Nyata: Keputusan Status Pegawai: Keputusan Status Pegawai Terkait Penegerian PTS Disambut Baik", *Kompas*, Jum'at, 8 Januari 2016.

"Dosen PPPK Tetap Dapat Tunjangan", *Koran Sindo*, Sabtu, 9 Januari 2016.

"Pengangkatan PPPK Tunggu Perpres", *Koran Sindo*, Selasa, 12 Januari 2016.

"Bangun Kemandirian (Perguruan Tinggi Jadi Agen Pembangunan Ekonomi)", *Kompas*, Senin, 1 Februari 2016.

"Penguatan PTS Sangat Penting (Terjadi Kesenjangan Besar di Antara Perguruan Tinggi)", *Kompas*, Selasa, 16 Februari 2016.

"Kebijakan Masalah PTS", *Kompas*, Jum,at, 26 Februari 2016.

"Anggaran Pendidikan Tinggi: Hilangkan Dikotomi Negeri-Swasta", *Kompas*, 26 Februari 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

UUD NRI Tahun 1945

KUH Perdata

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU Nomor 13 Yahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil